

Sudah Siapkah Tenaga Kerja Indonesia Bersaing Menghadapi MEA?

Nursiah Fitri¹, Alemina²

¹Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Medan, Medan 20155
E-mail: nursiahf@gmail.com

²Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Medan, Medan 20155
E-mail: ale_kacaribu@yahoo.com

ABSTRAK

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Sekarang ASEAN beranggotakan 10 negara. Tanggal 20 November 2007 disepakati Piagam ASEAN dan menjadikan ASEAN organisasi berbadan hukum dengan fokus perhatian pada proses integrasi ekonomi menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA (*ASEAN Economic Community/AEC*) yang telah diberlakukan pada 31 Desember 2015 dan memiliki 4 pilar utama meliputi: (1) berbasis pada pasar dan produksi tunggal; (2) kawasan ekonomi yang kompetitif; (3) wilayah pembangunan ekonomi yang adil; dan (4) kawasan ekonomi yang terintegrasi dalam ekonomi global. Selama periode 2007 – 2012, misalnya, rasio angkatan kerja berpendidikan tinggi di Indonesia adalah sebesar 7,02, tergolong sangat rendah dibanding Thailand, Singapura, dan Malaysia, yang memiliki rasio masing-masing sebesar 13,38%, 26,92%, dan 23%. Daya saing TKI dari sisi pertumbuhan produktivitasnya berada pada peringkat ketiga atau rata-rata sebesar 3,60%. Daya saing tenaga kerja tertinggi adalah Malaysia dan Singapura dengan rata-rata sebesar 4,17% dan 3,63%. Akibatnya, tenaga kerja Indonesia belum siap bersaing menghadapi MEA. Para alumni pendidikan tinggi vokasi dalam menghadapi MEA harus memiliki keterampilan-ketrampilan, meliputi: (1) *Leadership*; (2) *Digital Literacy*; (3) *Communication*; (4) *Emotional Intelligence (EI)*; (5) *Entrepreneurship*; (6) *Global Citizenship*; (7) *Problem Solving*; dan (8) *Teamwork*.

Kata kunci

MEA, tenaga kerja, daya saing, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand melalui Deklarasi ASEAN (Deklarasi Bangkok) yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand (*ASEAN Founding Fathers*). Pada tanggal 7 Januari 1984, Brunei Darussalam masuk sebagai anggota baru ASEAN. Pada tanggal 28 Juli 1985, Vietnam masuk sebagai anggota ASEAN. Myanmar dan Laos menjadi anggota ASEAN pada tanggal 28 Juli 1997 dan Kamboja pada tanggal 16 Desember 1998. Dengan demikian sampai sekarang ASEAN beranggotakan 10 Negara (Peta 1). Tujuan didirikan ASEAN seperti yang tercantum dalam persetujuan Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 secara rinci adalah sebagai berikut: (1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara; (2) Memajukan perdamaian dan stabilitas regional; (3) Memajukan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) Memajukan kerjasama dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, dan komunikasi; (5) Memajukan penelitian bersama mengenai masalah-masalah di Asia Tenggara; dan (6) Memelihara kerjasama yang

lebih erat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional [1][2].

KTT ASEAN ke-9 tahun 2003, ASEAN menyepakati BALI CONCORD II yang memuat 3 (tiga) pilar untuk mencapai ASEAN Vision 2020 yaitu Ekonomi, Sosial Budaya dan Politik Keamanan. Terkait dengan ekonomi, diwujudkan dalam bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tanggal 20 November 2007 disepakati Piagam ASEAN dan menjadikan ASEAN organisasi berbadan hukum dengan fokus perhatian pada proses integrasi ekonomi menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA (*ASEAN Economic Community/AEC*). Di tahun ini juga, ASEAN sepakat mempercepat implementasi MEA dari tahun 2020 dan telah disepati untuk mewujudkan MEA pada 31 Desember 2015 [1][2]. Tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan penting yang diangkat, yaitu: sudah siapkah tenaga kerja Indonesia bersaing menghadapi MEA?

2. PEMBAHASAN

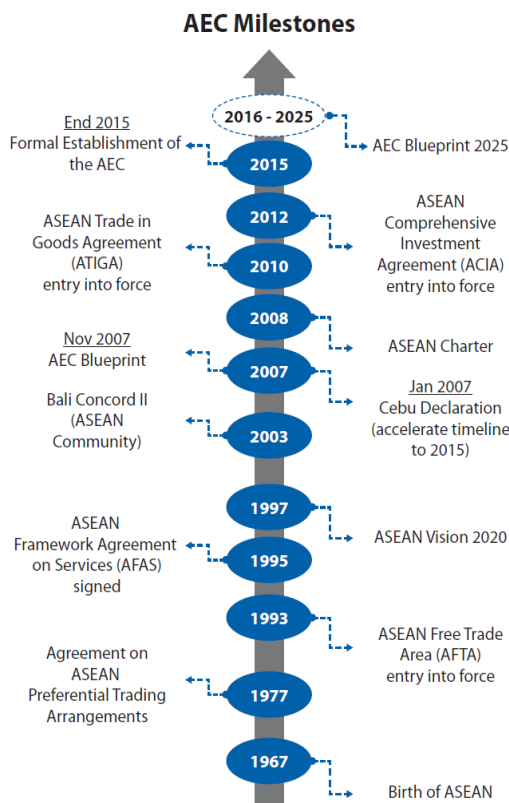
2.1. Letak Geografis Negara-negara ASEAN dan 4 Pilar MEA

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 dan telah diberlakukannya MEA terhitung 31 Desember 2015. Ilustrasi berdirinya

ASEAN pada 8 Agustus 1967 hingga diberlakukannya MEA pada 31 Desember 2015 disajikan di Gambar 1. MEA merupakan tujuan dari integrasi ekonomi regional kawasan Asian Tenggara yang diberlakukan pada 31 Desember 2015 yang memiliki 4 pilar utama meliputi: (1) berbasis pada pasar dan produksi tunggal; (2) kawasan ekonomi yang kompetitif; (3) wilayah pembangunan ekonomi yang adil; dan (4) kawasan ekonomi yang terintegrasi dalam ekonomi global (Gambar 2).



Peta 1. Letak geografi 10 Negara Anggota ASEAN [2: 282].



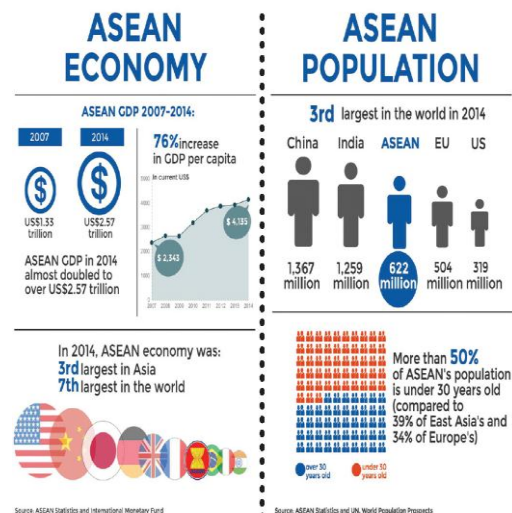
Gambar 1. Ilustrasi berdirinya ASEAN pada 8 Agustus 1967 hingga diberlakukannya MEA pada 31 Desember 2015 [1: 4].



Gambar 2. 4 Pilar MEA [2: 281].

2.2. Dampak Positif dan Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Menghadapi MEA

Secara umum, MEA memiliki lima dampak positif, meliputi: (1) mendorong arus investasi dari luar masuk ke dalam negeri yang akan menciptakan *multiplier effect* dalam berbagai sektor khususnya dalam pengembangan bidang ekonomi; (2) kondisi pasar yang tunggal membuat kemudahan dalam hal pembentukan *joint venture* (kerjasama) antara perusahaan-perusahaan di kawasan ASEAN sehingga akses terhadap produksi semakin mudah; (3) pasar ASEAN merupakan pasar besar yang begitu potensial dan juga menjanjikan dan merupakan peringkat 3 terbesar di Asia dan peringkat 7 terbesar di dunia dan jumlah penduduk yang mencapai 622 juta jiwa; (4) memberikan peluang kepada negara-negara ASEAN dalam hal meningkatkan kecepatan perpindahan sumber daya manusia dan modal yang merupakan dua faktor utama produksi yang sangat penting; dan (5) menciptakan adanya transfer teknologi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang yang ada di kawasan ASEAN (Gbr. 3).



Gambar 3. Populasi Penduduk dan Perkembangan Ekonomi ASEAN [1: 4].

Pada umumnya, terdapat sembilan persoalan mendasar yang masih dihadapi Indonesia dalam menghadapi MEA: (1) masih tingginya jumlah pengangguran terselubung (*disguised unemployment*); (2) rendahnya jumlah wirausaha baru untuk mempercepat perluasan kesempatan kerja; (3) pekerja Indonesia didominasi oleh pekerja yang tidak terampil sehingga produktivitas mereka rendah; (4) meningkatnya jumlah pengangguran tenaga kerja terdidik, akibat ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja; (5) ketimpangan produktivitas tenaga kerja antar sektor ekonomi; (6) sektor informal mendominasi lapangan pekerjaan, dimana sektor ini belum mendapat perhatian optimal dari pemerintah; (7) pengangguran di Indonesia merupakan pengangguran tertinggi 10 negara anggota ASEAN, termasuk ketidaksiapan tenaga kerja terampil dalam menghadapi MEA; (8) tuntutan pekerjaan terhadap upah minimum, tenaga kontrak, dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan (9) masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang banyak tersebar di luar negeri [3].

Dari sisi pendidikan daya saing TKI dan negara-negara ASEAN (Singapura, Malaysia, Thailand) diukur dengan membandingkan rasio angkatan kerja yang memiliki jenjang pendidikan Diploma/Universitas dengan total angkatan kerja. Dari hasil perhitungan, rata-rata selama lima tahun (2007 – 2012; Tabel 1), misalnya, rasio angkatan kerja berpendidikan tinggi di Indonesia adalah sebesar 7,02, tergolong sangat rendah dibanding Thailand, Singapura, dan Malaysia, yang masing-masing memiliki rasio masing-masing sebesar 13,38%, 26,92%, dan 23%. Data ini secara nyata menunjukkan bahwa daya saing TKI dari sisi pendidikan tinggi (Diploma/Universitas) adalah yang terendah posisinya dibanding negara-negara pesaing utama di kawasan ASEAN, yaitu Singapura, Malaysia dan Thailand [4].

Tabel 1. Persentase Rasio Angkatan Kerja Berpendidikan Tinggi (Diploma/Universitas) di lima negara ASEAN Periode 2007 - 2012 Terhadap Total Angkatan Kerja [4: 122].

Tahun	Indonesia	Filipina	Thailand	Malaysia	Singapura
2007	6.50	21.20	-	20.30	23.70
2008	7.10	21.70	14.90	21.20	25.80
2009	7.10	22.30	15.50	23.40	26.70
2010	7.10	22.10	16.00	24.20	27.60
2011	7.12	23.60	16.80	24.50	28.30
2012	7.20	24.40	17.10	24.40	29.40
Posisi/ Ranking Daya Saing	5	4	3	2	1

Jika dibanding rasio angkatan kerja di Indonesia dengan negara utama ASEAN lainnya yang telah berpendidikan menengah (*secondary education*), maka Indonesia tetap

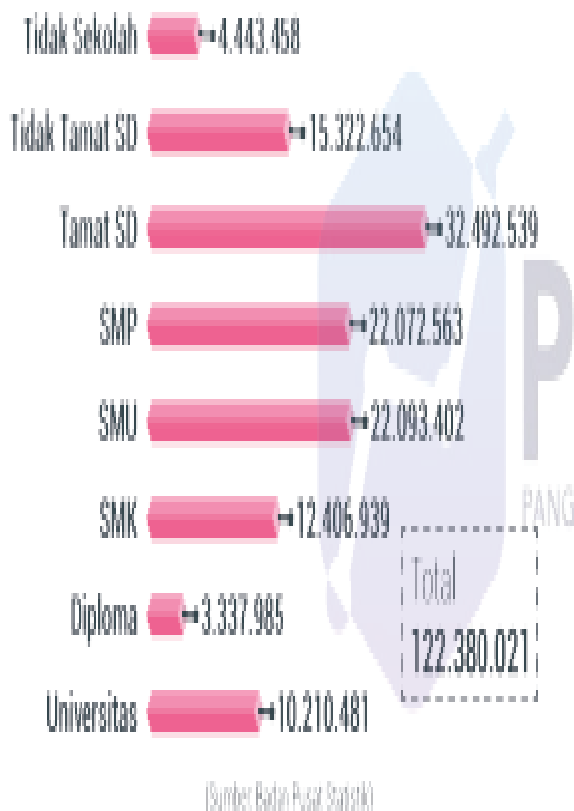
berada di belakang Singapura dan Malaysia. Rasio Indonesia adalah 22,41% atau berada pada posisi ketiga. Singapura menduduki posisi pertama dengan rasio sebesar 49,43%, sedangkan Malaysia menempati posisi kedua dengan rasio sebesar 47,80%. Pada kenyataannya, Indonesia dapat dinilai belum siap untuk menghadapi perdagangan bebas MEA pada tahun 2015, karena tidak hanya kualitas pendidikan TKI masih kurang dibanding negara-negara utama lainnya di kawasan ASEAN, tetapi system pendidikan di Indonesia belum mempersiapkan TKI untuk terakses kepada lapangan kerja. Jika daya saing tenaga kerja yang ditinjau dengan menggunakan ukuran produktivitas tenaga kerja pada sektor perekonomian (pertanian, industri pengolahan/manufaktur, dan jasa-jasa (Tabel 2). Data dalam di Tabel 2 menunjukkan bahwa daya saing TKI dari sisi pertumbuhan produktivitasnya berada pada peringkat ketiga atau rata-rata sebesar 3,60%. Daya saing tenaga kerja tertinggi adalah Malaysia dan Singapura dengan rata-rata sebesar 4,17% dan 3,63%. Indonesia dalam hal ini hanya bisa bersaing dengan Thailand dan masih unggul dari negara-negara non-utama ASEAN yang lain, yaitu Kamboja, Filipina, dan Vietnam [4].

Khusus Indonesia, berdasarkan jumlah angkatan kerja menurut jenjang pendidikan tertinggi 2015, mayoritas tenaga kerja di Indonesia merupakan tamatan Sekolah Dasar (SD), yakni berjumlah 32.49.539 jiwa (26, 5%). Sedangkan, angkatan kerja yang berasal dari jenjang universitas (sarjana) berjumlah 10.210.481 orang (8,3%), dan disusul jumlah terendah berasal dari jenjang diploma, yakni 3.337.985 orang (2,75%). Pemberlakuan MEA pada 31 Desember 2015 menyebabkan perdagangan bebas dikawasan Asia Tenggara menjadi tanpa kendala. MEA merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi. Saat ini pendidikan tinggi vokasi dituntut untuk dapat menghasilkan lulusan berkualitas internasional yang dilengkapi dengan keterampilan profesional, keterampilan bahasa dan keterampilan antar budaya. Perguruan tinggi vokasi juga harus mampu memberi kontribusinya mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang berkompetensi, kritis dan solutif guna menghadapi MEA 2015. Diharapkan dengan ini mahasiswa-mahasiswi Indonesia dapat membuat MEA 2015 bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk menuju Indonesia yang lebih baik [5].

Tabel 2. Rata-rata Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja Tahunan (%: 2004 - 2012) di negara negara ASEAN [4: 123-124].

Tahun	Filipina	Indonesia	Thailand	Malaysia	Singapura
2004	7.188	8.670	14.215	21.400	45.392
2005	7.398	9.140	14.591	22.394	48.122
2006	7.677	9.491	15.122	23.118	47.345
2007	7.958	9.642	15.690	23.962	49.069
2008	8.163	9.960	15.611	24.826	45.955
2009	8.024	10.186	15.157	23.920	44.756

2010	8.401	10.474	16.152	23.728	48.981
2011	8.457	11.002	15.988	24.226	49.704
2012	8.667	11.461	16.764	24.857	49.719
Rerata	7.993	10.003	15.477	23.603	47.671
Posisi / Ranking Daya Saing	5	4	3	2	1



Gambar 4. Komposisi Angkatan Kerja di Indonesia Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi 2015 [5: 21).

2.3. Pendidikan Vokasi Menghadapi MEA

Tuntutan perubahan era global telah menjadikan pendidikan tinggi vokasi memiliki peran strategis dan berada di garda terdepan dalam penanganan usia angkatan kerja. Pendidikan tinggi vokasi diprogramkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki penguasaan IPTEK, mandiri, terampil dan terlatih sesuai dengan tuntutan dunia industri atau dunia kerja. Hasil pembelajaran tersebut diperlukan sebagai modal dalam menghadapi persaingan regional maupun global. Secara khusus juga akan mampu menjawab tantangan yang muncul karena adanya MEA. Perubahan orientasi kerja, persyaratan kerja dan persaingan yang makin ketat pada era global juga menuntut perlunya

peningkatan kompetensi lulusan dan perubahan paradigma tentang proses belajar mengajar. Perubahan paradigma tersebut berdampak pada perlunya perubahan kurikulum dan perubahan perilaku serta model pembelajaran yang bertujuan untuk peningkatan mutu lulusan. Paradigma proses pembelajaran yang semula berupa penyampaian pengetahuan (*transfer of knowledge*) dimana mahasiswa bersifat pasif reseptif yang biasa dikenal dengan *Teacher Centered Learning (TCL)* telah berubah menjadi pembelajaran aktif dengan mengoptimalkan partisipasi aktif mahasiswa untuk mencari pengetahuan dengan berbagai strategi yang spesifik yang sering disebut pembelajaran *Student Centered Learning (SCL)*. Melalui model pembelajaran *SCL* pada Pendidikan Tinggi Vokasi diharapkan dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi realita hidup, siap kerja, mandiri, siap berkompetisi dan menghadapi tantangan dunia [6].

Oleh karena itu, para alumni pendidikan tinggi vokasi dalam menghadapi MEA harus memiliki keterampilan-keterampilan, meliputi: (1) *Leadership*, keterampilan untuk mempengaruhi diri sendiri (*self leadership*), mempengaruhi tim (*team leadership*) dan juga mempengaruhi semua orang didalam organisasi (*Organizational leadership*) agar berkomitmen dan bekerja sama untuk mencapai visi dan misi yang dicanangkan organisasi tersebut; (2) *Digital Literacy*, berkaitan dengan keterampilan dalam tiga hal berikut yakni : kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi atau jaringan untuk menemukan, mengevaluasi menggunakan dan menciptakan informasi, kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dan berbagai sumber ketika disajikan dalam komputer, dan kemampuan seseorang untuk melakukan tugas secara efektif dalam lingkungan digital; (3) *Communication*, berkaitan dengan keterampilan mengkomunikasikan informasipenting secara mudah dan singkat agar dapat dipergunakan untuk pembuatan keputusan peningkatan kinerja organisasi; (4) *Emotional Intelligence (EI)*, keterampilan untuk mengidentifikasi, menggunakan, memahami, dan mengelola emosi secara positif untuk meredakan stress, berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, berempati dengan orang lain, mengatasi tantangan dan meredakan konflik; (5) *Entrepreneurship*, keterampilan mengembangkan, mengatur mengelola usaha usaha kreatif bersama dengan resiko yang diperhitungkan (*calculated risks*) dalam rangka untuk menciptakan manfaat-manfaat dari usaha usaha kreatif itu; (6) *Global Citizenship*, keterampilan seseorang yang mampu menempatkan identitas mereka agar sesuai dengan komunitas global lebih dari identitas mereka sebagai warga negara tertentu atau asal suku bangsa tertentu; (7) *Problem Solving*, proses mental yang melibatkan, menemukan menganalisis dan memecahkan masalah. Tujuan utama dari pemecahan masalah adalah mengatasi hambatan dan menemukan solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah; dan (8) *Teamwork*, proses kerjasama-sama dengan sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. *Teamwork* merupakan bagian penting dari

keberhasilan organisasi, karena kita membutuhkan rekan-rekan kerja untuk bekerja bersama dengan baik, mencoba ide-ide terbaik mereka dalam situasi apapun agar mencapai sinergi dalam hasil. Prinsip dua kepala lebih baik daripada satu kepala berlaku dalam *teamwork* ini [3].

3. KESIMPULAN

1. Tanggal 20 November 2007 disepakati Piagam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan menjadikan ASEAN organisasi berbadan hukum dengan fokus perhatian pada proses integrasi ekonomi menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA (ASEAN Economic Community/AEC) yang diberlakukan pada 31 Desember 2015 dan memiliki 4 pilar utama meliputi: (1) berbasis pada pasar dan produksi tunggal; (2) kawasan ekonomi yang kompetitif; (3) wilayah pembangunan ekonomi yang adil; dan (4) kawasan ekonomi yang terintegrasi dalam ekonomi global.
 2. Selama periode 2007 – 2012, misalnya, rasio angkatan kerja berpendidikan tinggi di Indonesia adalah sebesar 7,02, tergolong sangat rendah dibanding Thailand, Singapura, dan Malaysia, yang masing-masing memiliki rasio masing-masing sebesar 13,38%, 26,92%, dan 23%. Daya saing TKI dari sisi pertumbuhan produktivitasnya berada pada peringkat ketiga atau rata-rata sebesar 3,60%. Daya saing tenaga kerja tertinggi adalah Malaysia dan Singapura dengan rata-rata sebesar 4,17% dan 3,63%. Indonesia dalam hal ini hanya bisa bersaing dengan Thailand dan masih unggul dari negara-negara non-utama ASEAN yang lain, yaitu Kamboja, Filipina, dan Vietnam.
 3. Tenaga kerja Indonesia belum siap bersaing menghadapi MEA.
 4. Para alumni pendidikan tinggi vokasi dalam menghadapi MEA harus memiliki keterampilan-keterampilan, meliputi: (1) *Leadership*; (2) *Digital Literacy*; (3) *Communication*; (4) *Emotional Intelligence (EI)*; (5) *Entrepreneurship*; (6) *Global Citizenship*; (7) *Problem Solving*; dan (8) *Teamwork*.
- [1] Asean Secretariat, "A Blueprint for Growth ASEAN Economic Community 2015: Progress and Key Achievements", Jakarta: ASEAN Secretariat, 2015.
 - [2] M. Syahrudin, Rosmayati, D. Bakti, and Y.L. Henuk, "Public Policies for Higher Education Systems in 10 ASEAN Associate Countries", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 81: 280 – 286, 2017.
 - [3] Setyoko, "Peran Pendidikan Tinggi Vokasi Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)", *ORBITH*, 11(2), Juli: 122 – 125, 2015.
 - [4] M.A.S. Rahman, "Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)", *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 3 (1): 117-130, 2015.
 - [5] T.E. Priandono, H. R. Sanabila, M. Heychael, dan R. Mahendra, "Puspawarna Pendidikan Tinggi Indonesia". Jakarta: Kementerian Ristekdikti RI, 2016.
 - [6] P. Nurwardani, S.W. Nugroho, S. Arifin, S. Madya, R.T. Widodo, Y. Samodra, Taufiqurrahman, M. Fikrianto, E.S. Nugroho, H. Suryanto, E. Susanti, dan Yektiningtyasuti, "Buku Panduan Teknologi Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi". Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami berterima kasih kepada Prof. Yusuf L. Henuk, Ph.D dari Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara (USU) - Medan yang telah memotivasi kami untuk tampil di seminar nasional ini, termasuk membantu mengedit naskah tulisan ini hingga berkomunikasi lewat media elektronik dengan Panitia 8th Industrial Research Workshop and National Seminar 2017

DAFTAR PUSTAKA